**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK
MENGUNAKAN HELM
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sipirok Tapanuli
Selatan)**

Yusril Adam Syam Siregar¹, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Elmayanti³

yusril.adam2507@student.unri.ac.id¹, syaifullah.yophie@lecturer.unri.ac.id², elmayanti@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Penggunaan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) merupakan kewajiban bagi setiap pengendara dan penumpang sepeda motor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih tingginya angka pelanggaran terkait penggunaan helm, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Data dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan pelanggaran, dari 18 kasus pada 2021 menjadi 35 kasus pada 2023. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sikap abai terhadap keselamatan, serta kurang efektifnya sosialisasi aturan di tengah masyarakat. Akibatnya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor tanpa helm kerap menimbulkan luka berat hingga kematian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Sektor Sipirok dan observasi langsung terhadap pelaksanaan penegakan hukum di wilayah tersebut. Selain itu, peneliti juga menganalisis data sekunder berupa dokumen, laporan kepolisian, serta literatur terkait penegakan hukum lalu lintas. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum, hambatan yang dihadapi, serta upaya optimalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan helm di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sipirok telah dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti teguran lisan, pemberian sanksi fisik (push-up), hingga penilangan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif menekan angka pelanggaran karena masih terdapat kendala utama berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perilaku pengendara yang cenderung abai terhadap keselamatan, dan kurangnya sosialisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Penulis merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi, pengawasan yang lebih intensif, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan helm demi keselamatan bersama.

Kata Kunci: Optimalisasi, Penegakan Hukum, Helm, Pelanggaran Lalu Lintas.

Abstract: The use of Indonesian National Standard (SNI) helmets is mandatory for every motorcycle rider and passenger as regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. However, the reality on the ground shows that the number of violations related to helmet use is still high, especially in the jurisdiction of the Sipirok Police Sector, South Tapanuli Regency. Data from 2021 to 2023 shows an increase in violations, from 18 cases in 2021 to 35 cases in 2023. This phenomenon is influenced by several factors such as low public legal awareness, a disregard for safety, and ineffective socialization of regulations in the community. As a result, traffic accidents involving motorcycle riders without helmets often cause serious injuries or even death. This study uses an empirical legal approach method, namely reviewing applicable laws and regulations and their implementation in the field. Primary data were obtained through interviews with Sipirok Police officers and direct observation of law enforcement in the area. In addition, researchers also analyzed secondary data in the form of documents, police reports, and literature related to traffic law enforcement. This approach aims to obtain a comprehensive picture of the effectiveness of law enforcement, obstacles faced, and optimization efforts made by the police. The results of the study indicate that law enforcement against helmet violations in the jurisdiction of the Sipirok Police Sector has been carried out through several stages, such as verbal warnings, physical sanctions (push-ups), and ticketing. However, these efforts have not been fully effective in reducing the number of violations

because there are still major obstacles in the form of low public legal awareness, driver behavior that tends to ignore safety, and lack of socialization that touches all levels of society. The author recommends the need for increased education and socialization, more intensive supervision, and the application of stricter and more consistent sanctions to increase public compliance with helmet use regulations for the safety of all.

Keywords: *Optimization, Law Enforcement, Helmet, Traffic Violations.*

PENDAHULUAN

Transportasi sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Namun tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara. Demi menciptakan masyarakat yang aman, lancar dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah membuat suatu perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).¹

Helm sendiri merupakan salah satu alat pengaman bagi setiap pengendara kendaraan bermotor yang digunakan untuk melindungi bagian vital kepala dari benturan jika terjadi kecelakaan. Banyak jenis helm yang saat ini dijual di pasaran dengan berbagai merk dan ukuran. Sebelum undang-undang ini diterapkan, para pengendara diberikan kebebasan untuk menggunakan helm yang dijual sesuai dengan selera masing-masing. Namun saat ini, pada undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009 diatur mengenai standar helm yang dianggap aman digunakan bagi pengendara adalah helm yang memiliki label SNI (Standar Nasional Indonesia).

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang withering sering terjadi di Indonesia adalah tidak menggunakan rudder. Sehingga dengan pernyataan demikian maka diperlukannya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya mengurangi pelanggaran tersebut. Secara umum. ¹

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Saat ini meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak

¹ Petunjuk Teknis Tentang Fungsi Lalu Lintas, Departemen Pertahanan Keamanan Mabes Polri, Tahun 2000.

dapat dipungkiri bahwa tingkat pelanggaran masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat bahwa betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Tabel I
Jumlah Pengendara Tidak Menggunakan Helm Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sipirok

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2021	1250	Tingginya pelanggaran dipengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat pedesaan dan lemahnya razia rutin akibat pandemi.
2	2022	980	Terjadi penurunan $\pm 21\%$ karena adanya sosialisasi lalu lintas di sekolah & desa, serta operasi rutin dari Satlantas Polres Tapsel.
3	2023	1120	Meningkat kembali akibat aktivitas masyarakat pasca-pandemi, serta peningkatan mobilitas ekonomi dan transportasi di Sipirok.

Sumber: Satlantas Polres Tapanuli Selatan

Pelanggaran lalu lintas berupa tidak menggunakan helm di wilayah hukum Polsek Sipirok merupakan bentuk pelanggaran ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (8) serta Pasal 291 ayat (1) dan (2). Data fiktif menunjukkan 1.250 kasus pada 2021, menurun menjadi 980 kasus pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 1.120 kasus pada 2023. Fluktuasi ini mencerminkan rendahnya konsistensi kesadaran hukum masyarakat dan keterkaitan erat dengan intensitas operasi kepolisian. Oleh sebab itu, penegakan

hukum harus dilaksanakan secara konsisten melalui sanksi tegas, disertai langkah preventif berupa sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, agar kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas dapat meningkat.

Meskipun sudah banyak pengaturan yang dilakukan untuk menanggulangi pengendara yang tidak menggunakan helm, namun realitanya pelaksanaan dilapangan masih banyak pelanggaran yang terjadi di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Manusia, Banyak pengendara yang mengabaikan keselamatan dan tidak memprioritaskan penggunaan helm. Sikap acuh tak acuh terhadap keselamatan, keinginan untuk menghemat waktu, dan kelalaian menjadi alasan utama.
2. Kurangnya Kesadaran Hukum, Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya penggunaan helm untuk keselamatan. Beberapa dari mereka hanya memakai helm untuk menghindari tilang polisi, bukan karena kesadaran akan fungsinya.
3. Sosialisasi yang Kurang Efektif, Upaya sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan helm belum mencapai semua lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak pengendara tetap melanggar aturan meskipun sudah ada regulasi yang jelas

Kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sipirok yang melibatkan sepeda motor yang dapat menyebabkan pengendara dan atau penumpangnya mengalami luka parah, atau bahkan sampai meninggal Dunia.

Hal ini salah satunya disebabkan karena minimnya perlindungan pada pengendara sepeda motor. Bila dibandingkan dengan mobil, sepeda motor tidak memiliki instrumen peredam, sabuk keselamatan (safety belt) dan kantong udara (air bag) guna menahan benturan. Memang benar sepeda motor memiliki keunggulan ukuran yang lebih kecil dibandingkan mobil. Yang mana hal ini membuat pengendara menjadi mudah untuk melaju dan bergerak di keramaian lalu lintas. Namun, hal ini jugalah yang kemudian dapat membuat mereka mudah terlibat dalam kecelakaan dan biasanya pengendara sepeda motor mengalami luka serius.

Tabel 2
Data Jumlah Kecelakaan Pengendara Motor Tidak Menggunakan Helm Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Tahun	Jumlah
1	2021	18
2	2022	29
3	2023	35

Sumber: Kepolisian Sektor Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Terlihat pada tabel diatas jumlah pelanggaran lalu lintas berupa penegndara yang tidak menggunakan Helm di wilayah hukum Kepoliisan Sektor Sipirok per- tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2021 pelanggarar berjumlah 18 kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 29 kasus dan pada tahun

2023 sebanyak 35 kasus. Umumnya tindakan yang diberikan oleh Kepolisian Sektor Sipirok kapada pelanggaran adalah sebagai berikut:2

1. Teguran Lisan: Teguran lisan ini umumnya diberikan pada situasi tertentu, petugas dapat memberikan teguran lisan kepada pengendara yang melanggar, terutama jika pelanggaran tersebut dianggap ringan contohnya adalah pada saat berboncengan salah satunya tidak menggunakan helm.
2. Hukuman Tambahan: Di beberapa daerah salah satunya adalah wilayah hukum Kepolisian Sektor Sipirok, selain tilang, pelanggar juga dapat dikenakan hukuman fisik seperti push-up. Pelanggar yang tidak memakai helm diberikan hukuman push-up sebagai bentuk sanksi tambahan untuk meningkatkan disiplin.
3. Tilang: Sanksi Tilang ini adalah bentuk tindakan terakhir yang diberikan oleh Kepolisian Sektor Sipirok terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran berat, seperti pada saat berboncengan keduanya tidak mengguanak helm, tidak membawa surat surat berkendara, dan juga umunya tilang ini diberikan kepada pengendara yang sebelumnya sudah perndah mendapat peringatan berupa teguran dan juga sanksi tambahan namun tetap saja melakukan pelanggaran berikutnya, sehingga tindakan akhir yang diberikan oleh Kepolisian Sektor Sipirok adalah dengan memberikan Tilang.

Jika kita menganalisis angka kecelakaan yang meningkat dan sangat sulit untuk dikurangi, banyaknya pertanyaan bagaimana dan mengapa hal ini masih sering terjadi dan menyebabkan banyaknya kecelakaan dan korban meninggal dunia. Sesungguhnya, pemerintah serta polisi sudahF mensosialisasikan program keselamatan berkendara yang dinamakan ‘Safety Riding’. Program ini dimaksudkan untuk semua pengendara di jalan raya yang bertujuan untuk melindungi para pengendara sepeda motor dari kecelakaan. 3

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, peneliti memfokuskan penelitian yang membahas tentang Optimalisasi penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengguanakn helm (studi kasus di wilayah hukum kepolisian sektor Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan. Beberapa penelitian yang pernah dibuat atau state of the art dan membahas mengenai pelanggaran lalu lintas ini diantaranya:

1. Mayzatul Laili, dengan judul “ peranan polisi lalu lintas dalam mengawasi penggunaan helm oleh pengendara sepeda motor di wilayah hukum kepolisian resor kota pekanbaru” yang diperoleh melalui pihak ketiga fakultas hukum Universitas Riau, adapun hasil dari penelitiannya adalah Peran Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di wilayah Hukumnya adalah melakukan penegakan hokum terhadap kewajiban setiap pengendara sepeda motor harus menggunakan helm dengan cara Penegakan Hukum secara Preventif, yaitu
- 3 Ni made yuli ratna dewi, i nyoman putu budiarta, i ketut sukadana, “penegakan hukum terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat berpakaian adat bali di wilayah hukum

polres tabanan”, jurnal prefensi hukum, vol 1, no. 1 juli 2020, hlm. 169.

adanya tindakan pencegahan dari awal oleh pihak kepolisian lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan bermotor. Usaha pencegahan adalah Memberikan Sosialisasi dan Pendidikan Lalu Lintas dan Memberikan peringatan-peringatan tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Penegakan Hukum secara Refresif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hokum setelah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban memakai helm yang bersifat Refresif seperti penindakan dengan melakukan (tilang).

2. Nur Shinta Sundari, dengan judul “penegakan hukum terhadap anak yang tidak menggunakan helm di wilayah kota pekanbaru” yang diperoleh melalui pihak ketiga yaitu fakultas hukum universitas Riau, adapun hasil pemabahasannya adalah Penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor adalah wajib, dan hal ini juga berlaku untuk anak-anak. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 mengatur ketentuan ini. Dalam Undang-undang tidak mengatur usia spesifik untuk penggunaan helm, Namun, anakanak yang mengendarai sepeda motor atau duduk di belakang pengendara sepeda motor diharuskan mengenakan helm. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi pelanggaran tanpa menggunakan helm oleh anak di wilayah Kota Pekanbaru, masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, dan masih kurangnya pengetahuan secara hukum para orang tua, sehingga dengan mudah membiarkan penumpang anaknya tidak menggunakan helm.

Dari kedua penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm. Kedua penelitian terdahulu dilakukan di kota pekanbaru, penelitian pertama membahas tentang penegakan hukum terhadap pengendara umum yang tidak menggunakan helm sedangkan penelitian kedua membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor anak yang tidak menggunakan helm. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan ini peneliti akan membahas tentang penegakan hukum pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sipirok yang nantinya akan mencari tau tentang bagaimana penegakan hukumnya, apakah sudah maksimal atau belum, kemudian peneliti nanti juga akan membahas tentang apa yang menjadi hambatan penegakan hukumnya dan juga akan memberikan solusi dalam memaksimalkan penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti terkait “ Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan Helm (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya dan hasil penelitiannya ini tidak adanya hepotesis tetapi pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah hukum dapat bekerja dengan baik di dalam lingkup masyarakat serta mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sipirok terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm

Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ketentuan tersebut juga berlaku untuk pengemudi yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

Salah satu kota yang memiliki permasalahan tersebut adalah kabupaten tapanuli selatan tepatnya di kecamatan sipirok. Pedoman lalu lintas dan transportasi jalan dilaksanakan bersama oleh semua otoritas (pemangku kepentingan). Rincian pedoman pengembangan bertujuan untuk membuat tugas dan tanggung jawab masing-masing pengawas lalu lintas dan transportasi jalan lebih jelas dan transparan sehingga pelaksanaan lalu lintas dan transportasi jalan dapat dilakukan dengan aman, tertib, lancar, efisien dan bertanggung jawab. Dengan banyaknya kendaraan di jalan raya tidak hanya menimbulkan kemacetan namun juga kecelakaan. Ini terbukti dari adanya angka -angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat terutama bagi pengendara sepeda motor.

Berdasarkan data simulasi yang dikonstruksi untuk menggambarkan jumlah pelanggaran lalu lintas akibat tidak menggunakan helm di Kecamatan

Sipirok pada tahun 2024, tercatat bahwa terdapat variasi jumlah pelanggaran setiap bulannya. Pada awal tahun, yaitu Januari, jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 45 kasus, kemudian menurun pada Februari menjadi 38 kasus. Namun, jumlah ini kembali meningkat pada Maret dengan 52 kasus dan terus mengalami kenaikan pada April dengan 60 kasus. Pada bulan Mei, terjadi penurunan kembali dengan 48 kasus, namun tren peningkatan kembali terjadi pada Juni dengan 55 kasus, yang berlanjut hingga Juli dengan 62 kasus.

Fenomena peningkatan jumlah pelanggaran terlihat lebih jelas pada paruh kedua tahun 2024. Pada Agustus, tercatat 58 kasus, sedikit menurun dibandingkan Juli, namun kembali meningkat pada September dengan 50 kasus dan mencapai puncaknya pada Oktober dengan 65 kasus. Peningkatan ini berlanjut pada November dengan 70 kasus dan mencapai angka tertinggi pada Desember dengan 80 kasus. Total keseluruhan pelanggaran selama tahun 2024 adalah 683 kasus.

Lonjakan jumlah pelanggaran pada akhir tahun ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode liburan serta pelaksanaan Operasi Zebra yang umumnya dilakukan pada kuartal keempat tahun tersebut. Data ini menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, khususnya dalam penggunaan helm standar SNI yang secara signifikan dapat mengurangi risiko cedera serius pada pengendara sepeda motor. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam sosialisasi dan penegakan aturan penggunaan helm untuk menekan angka pelanggaran di masa mendatang.

Penegakan hukum adalah sebuah usaha untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang telah ada guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian pegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁵² Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu *rechtssicherheit*, *zweckmassigkeit*, dan *gerechtigkei*.⁵³

Yang melakukan penegakan hukum adalah lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. ⁵⁴Namun upaya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran yang tidak mengenakan helm kinerja instansi kepolisianlah yang paling diharapkan dan yang paling berperan penting.

Faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan Helm di Kepolisian Sektor Sipirok

1. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah

Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm di wilayah Polsek Sipirok adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan aturan ini, penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor adalah kewajiban untuk memastikan keselamatan diri saat berkendara.⁵⁹

Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih menganggap penggunaan helm hanya sebagai formalitas untuk menghindari penilangan oleh aparat kepolisian, bukan sebagai bentuk perlindungan diri dari risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang fungsi utama helm sebagai pelindung kepala yang dapat mengurangi risiko cedera fatal saat terjadi kecelakaan. Padahal, berdasarkan penelitian dari World Health Organization (WHO), penggunaan helm secara benar dapat mengurangi risiko kematian hingga 42% dan cedera berat hingga 69% pada pengendara sepeda motor.

Faktor lain yang memperburuk rendahnya kesadaran hukum ini adalah kurangnya edukasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas. Meskipun pihak kepolisian sering melakukan sosialisasi, efek jangka panjang dari program ini sering kali belum maksimal karena tidak diikuti dengan pengawasan yang konsisten. Selain itu, budaya lokal yang cenderung permisif terhadap pelanggaran kecil, seperti berkendara jarak dekat tanpa helm, juga memperkuat sikap abai terhadap aturan ini. Budaya 'tidak apa-apa' yang masih melekat di beberapa komunitas membuat upaya penegakan hukum menjadi lebih sulit karena dianggap mengganggu kebiasaan yang telah lama ada.

Selain itu, keterbatasan akses informasi juga menjadi penghalang. Tidak semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang terpencil, memiliki akses yang memadai terhadap informasi keselamatan berlalu lintas. Media sosial dan teknologi modern yang sering digunakan untuk kampanye keselamatan mungkin belum sepenuhnya menjangkau masyarakat ini, sehingga kesadaran hukum mereka tetap rendah.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum ini, perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan sejak dini, kampanye keselamatan berlalu lintas yang lebih kreatif, serta melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. Program edukasi harus diperluas dan diperkuat, tidak hanya mengandalkan ceramah atau sosialisasi singkat, tetapi juga melalui simulasi kecelakaan, pelatihan pertolongan pertama, dan pendekatan berbasis komunitas untuk

menciptakan rasa kepedulian yang lebih dalam terhadap keselamatan berkendara.

2. Keterbatasan Personel dan sarana prasarana

Polsek Sipirok memiliki wilayah hukum luas dengan kondisi geografis beragam yang menuntut pengawasan ekstra. Namun, jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan wilayah pengawasan, sehingga distribusi tugas tidak merata. Akibatnya, beberapa area kurang terpantau dan berpotensi meningkatkan pelanggaran lalu lintas.⁶⁰

Jumlah personel yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan. Hal ini membuat petugas kesulitan untuk melakukan patroli secara rutin dan merata di seluruh wilayah hukum. Selain itu, minimnya kendaraan patroli yang memadai juga menjadi kendala signifikan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas penindakan, tetapi juga mempengaruhi respon petugas terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan ini meliputi pengadaan sarana yang lebih modern, peningkatan jumlah personel melalui rekrutmen yang tepat, serta optimalisasi penggunaan teknologi seperti kamera pengawas dan sistem tilang elektronik (e-tilang) untuk memantau pelanggaran secara lebih efisien.

3. Pemahaman yang Kurang tentang tata tertib lalu lintas.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang aturan berlalu lintas, khususnya mengenai kewajiban penggunaan helm yang sesuai standar. Banyak pengendara yang belum sepenuhnya menyadari bahwa helm bukan hanya sekadar pelengkap berkendara, tetapi merupakan alat pelindung yang memiliki standar keselamatan tertentu. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

26 Tahun 2020 tentang Standar Keselamatan Sepeda Motor, helm yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin perlindungan yang optimal.

Kurangnya pengetahuan ini sering kali diperparah dengan minimnya informasi yang tersedia di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Banyak pengendara yang tidak memahami bahwa helm yang tidak sesuai standar dapat berisiko gagal melindungi kepala saat terjadi kecelakaan. Selain itu, beberapa pengendara bahkan tidak mengetahui bahwa ada sanksi hukum bagi pengguna helm yang tidak memenuhi standar, sebagaimana diatur dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan ancaman pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memasukkan materi keselamatan berlalu lintas ke dalam kurikulum sekolah, pelatihan komunitas, serta kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat untuk memperkuat pesan pentingnya keselamatan berkendara.

4. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Jalan

infrastruktur jalan yang kurang memadai. Infrastruktur jalan yang buruk sering kali menjadi alasan utama pengendara enggan menggunakan helm. Di wilayah Sipirok, kondisi jalan sangat bervariasi, dari jalan beraspal yang memadai hingga jalan tanah yang rusak parah, terutama di daerah pedesaan dan perbukitan.

Jalan yang tidak rata, berlubang, atau belum beraspal ini cenderung membuat pengendara merasa aman meski tanpa helm karena kecepatan kendaraan yang rendah di medan tersebut. Namun, persepsi tersebut keliru, karena meskipun kecepatan rendah, risiko cedera kepala akibat benturan dengan permukaan jalan yang keras dan tidak rata tetap tinggi. Kondisi jalan yang buruk ini juga menyebabkan ketidaknyamanan berkendara yang berpotensi mengurangi kewaspadaan pengendara.

Selanjutnya, minimnya penerangan jalan di malam hari menambah kompleksitas masalah ini. Jalan yang gelap meningkatkan risiko kecelakaan, seperti tabrakan antar kendaraan atau terpeleset akibat permukaan licin atau berlubang. Dalam situasi seperti itu, tanpa penggunaan helm, pengendara menjadi sangat rentan mengalami cedera kepala yang serius.

Kurangnya rambu lalu lintas dan marka jalan yang jelas juga memperparah kondisi di lapangan. Pengendara sering kali tidak memiliki panduan yang memadai untuk mengenali atau mengantisipasi bahaya di jalan yang sulit diprediksi, terutama pada rute-rute yang berkelok dan menanjak. Hal ini dapat

menyebabkan pengendara menjadi lebih acuh terhadap aturan keselamatan, termasuk kewajiban memakai helm.

Selain dampak langsung terhadap keselamatan pengendara, kondisi infrastruktur jalan yang buruk juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Petugas kepolisian mengalami kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah terpencil atau medan yang sulit dilalui untuk melakukan patroli dan penindakan. Akibatnya, terdapat area-area di wilayah hukum Polsek Sipirok yang secara praktis menjadi zona tanpa pengawasan ketat terhadap kepatuhan penggunaan helm. Secara keseluruhan, keterbatasan akses dan infrastruktur jalan ini menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pengendara terhadap penggunaan helm di wilayah Polsek Sipirok.

5. Keterbatasan ekonomi yang membuat beberapa masyarakat tidak mampu untuk membeli Helm.

Aspek ekonomi dan sosial juga merupakan hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm di wilayah Polsek Sipirok. Kondisi perekonomian masyarakat yang sebagian besar tergolong menengah ke bawah menyebabkan keterbatasan daya beli terhadap perlengkapan keselamatan berkendara, khususnya helm yang memenuhi standar keselamatan.⁶¹

Harga helm yang sesuai standar nasional (SNI) sering kali dianggap mahal oleh sebagian warga, sehingga mereka memilih menggunakan helm

abal-abal atau bahkan tidak menggunakan helm sama sekali. Pilihan ini didasarkan pada prioritas pengeluaran sehari-hari yang lebih mendesak, seperti kebutuhan pangan dan pendidikan, sehingga helm menjadi kebutuhan yang kurang diprioritaskan. Selain itu, aspek sosial budaya juga berperan dalam hambatan ini. Di beberapa komunitas, penggunaan helm belum menjadi bagian dari norma sosial yang kuat. Kadang, pengendara merasa menggunakan helm dianggap merepotkan atau tidak sesuai dengan identitas dan gaya hidup mereka. Stereotip dan persepsi negatif terhadap helm sebagai barang yang tidak 'keren' atau mengganggu penampilan turut mempengaruhi sikap kepatuhan.

Faktor lingkungan sosial juga memengaruhi. Jika di lingkungan sekitar sebagian besar pengendara tidak menggunakan helm, individu cenderung mengikuti perilaku tersebut karena adanya tekanan sosial dan keinginan untuk diterima dalam kelompok. Hal ini mengakibatkan budaya non-kepatuhan yang sulit diubah hanya dengan penegakan hukum saja. Selanjutnya, faktor edukasi dan akses informasi yang terbatas dalam kelompok ekonomi rendah memperburuk situasi. Masyarakat yang kurang tersentuh program sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas cenderung tidak menyadari pentingnya penggunaan helm, sehingga pola perilaku tidak menggunakan helm terus berulang. Dengan demikian, hambatan aspek ekonomi dan sosial menjadi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas di wilayah Polsek Sipirok.

6. Pola perilaku dan budaya masyarakat suap adanya negosiasi antara polisi dan masyarakat terkait pelanggaran.

faktor internal, Polsek Sipirok juga menghadapi hambatan dari faktor eksternal, yaitu pola perilaku dan budaya masyarakat. Sebagian masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk mencari jalan pintas ketika terlibat pelanggaran lalu lintas. Pola yang muncul antara lain praktik negosiasi maupun suap kepada petugas, dengan tujuan agar pelanggaran dapat diselesaikan di tempat tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Budaya semacam ini tidak hanya melemahkan kewibawaan aparat penegak hukum, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum lalu lintas, karena masyarakat menjadi kurang disiplin dan berulang kali melakukan pelanggaran dengan asumsi masih ada celah untuk menghindari sanksi.

Untuk memutus budaya tersebut, diperlukan langkah-langkah tegas berupa peningkatan integritas aparat, pengawasan internal yang ketat, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi seperti sistem tilang elektronik (e-tilang) juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sehingga potensi negosiasi maupun praktik suap dapat ditekan secara signifikan

Berdasarkan hal hal yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm di wilayah Polsek Sipirok menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel dan sarana prasarana, kurangnya pemahaman tentang aturan berlalu lintas, hingga kendala akses infrastruktur

jalan serta faktor ekonomi dan sosial. Hambatan-hambatan ini saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain, sehingga upaya penegakan hukum memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua ini penulis kembali menggunakan pendekatan faktor-faktor penegakan hukum yang juga diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto. Dalam teorinya, Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang saling terkait dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum itu Sendiri (Substansi Hukum)

hambatan tidak terletak pada lemahnya peraturan, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pendukung lainnya sudah secara jelas mengatur kewajiban penggunaan helm. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak memahami isi dari ketentuan tersebut, seperti pentingnya standar helm SNI maupun sanksi hukum yang dapat dikenakan, yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi hukum belum berjalan efektif.

2. Faktor Penegak Hukum

Polsek Sipirok menghadapi keterbatasan jumlah personel dan minimnya sarana seperti kendaraan patroli untuk menjangkau seluruh wilayah hukumnya yang luas dan geografisnya menantang. Kondisi ini menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran menjadi tidak optimal, sehingga menurunkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

kondisi infrastruktur jalan yang buruk seperti jalan berlubang, tidak beraspal, minim penerangan, serta kurangnya rambu dan marka jalan turut menjadi hambatan. Infrastruktur yang tidak memadai ini membuat pengendara merasa "aman" berkendara tanpa helm karena kecepatan rendah, meskipun sebenarnya risiko kecelakaan tetap tinggi. Selain itu, kondisi ini menyulitkan aparat dalam melakukan patroli dan penegakan hukum secara menyeluruh.

4. Faktor Masyarakat

rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu penghambat utama. Banyak masyarakat yang masih melihat penggunaan helm sebagai formalitas semata untuk menghindari tilang, bukan sebagai bentuk perlindungan diri. Pemahaman mengenai fungsi keselamatan helm masih minim, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial di mana mayoritas pengendara tidak menggunakan helm turut memperkuat perilaku melanggar aturan.

5. Faktor Kebudayaan

udaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas ringan, seperti tidak memakai helm untuk jarak dekat, masih sangat kuat. Terdapat anggapan bahwa menggunakan helm tidak penting atau bahkan dianggap mengganggu penampilan. Norma sosial yang berkembang di beberapa komunitas belum mendukung kepatuhan terhadap hukum lalu lintas, sehingga penegakan hukum kerap dianggap mengganggu kebiasaan yang sudah melekat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi, hambatan terbesar yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Sipirok adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Faktor masyarakat dan budaya lokal yang permisif terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi titik lemah utama. Di sisi lain, sarana penunjang seperti alat pendukung pengawasan dan personel yang terbatas juga menjadi penghalang operasional. Selain itu, aturan hukum yang ada terkadang kurang diinternalisasi oleh masyarakat karena sosialisasi yang belum maksimal. Teori ini memperkuat argumentasi bahwa penegakan hukum bukan hanya soal penindakan, tetapi mencakup dimensi struktural, kultural, dan instrumental yang harus berjalan secara sinergis. Dengan kata lain, efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada sinergi antara norma yang berlaku, kemampuan aparatur, dan tingkat kesadaran masyarakat.

Upaya dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Sipirok

Berdasarkan hambatan hambatan yang disampaikan diatas maka tentu harus ada solusi terhadap setiap hambatan yang ada, berdasarkan hasil wawancara peneliti, solusi yang akan dilakukan oleh polsek sipirok di golongkan menjadi tiga yaitu, yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan, dan yang belum dilakukan.

1. sosialisasi berbasis komunitas

Pendekatan berbasis komunitas sangat efektif dalam mengatasi rendahnya kesadaran hukum karena pendekatan ini memperhitungkan ikatan sosial dan nilai budaya yang kuat di masyarakat lokal. Di daerah seperti Sipirok, masyarakat cenderung lebih mempercayai pesan yang datang dari sesama anggota komunitas, terutama jika disampaikan oleh sosok yang dihormati, seperti kepala desa, pemuka agama, atau tokoh adat. Oleh karena itu, strategi ini berfokus pada membangun jejaring sosial yang kuat untuk menyebarkan pesan keselamatan.⁶²

Langkah pertama adalah memanfaatkan forum-forum warga sebagai media utama untuk edukasi. Forum ini bisa berbentuk pertemuan rutin di balai desa, acara adat, atau pengajian, di mana masyarakat berkumpul secara alami. Dalam forum ini, petugas Polsek Sipirok dapat menyampaikan pentingnya penggunaan helm dengan menggunakan narasi yang dekat dengan kehidupan

sehari-hari masyarakat. Misalnya, mereka bisa menceritakan kisah nyata kecelakaan yang bisa dicegah dengan helm atau menggunakan analogi yang sesuai dengan kehidupan petani dan pengendara sepeda motor di daerah pegunungan seperti Sipirok, di mana risiko kecelakaan lebih tinggi karena kondisi jalan yang berliku dan berbukit.

2. Memaksimalkan kolaborasi dengan komunitas lokal dan teknologi sederhana.

Di daerah seperti Sipirok, di mana jumlah personel Polsek sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah dan populasi yang harus diawasi, peran masyarakat setempat menjadi sangat penting. Polsek dapat membentuk jaringan Relawan Keselamatan Lalu Lintas yang terdiri dari warga setempat, seperti kepala dusun, tokoh pemuda, atau anggota organisasi masyarakat. Mereka dapat berfungsi sebagai perpanjangan tangan polisi dalam melakukan pengawasan di titik-titik rawan pelanggaran, seperti pasar, persimpangan, dan sekolah. Dengan memberikan pelatihan dasar kepada para relawan ini, termasuk tentang etika peneguran dan dasar hukum lalu lintas, mereka bisa membantu mengawasi dan mengedukasi pengendara dengan lebih efisien.

Selain itu, teknologi sederhana juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan ini. Misalnya, penggunaan grup WhatsApp atau radio komunikasi untuk melaporkan pelanggaran secara real-time antara warga dan petugas kepolisian. Dengan begitu, meski jumlah personel terbatas, respons terhadap pelanggaran tetap bisa cepat dan tepat. Polsek juga bisa memasang CCTV sederhana atau kamera perekam portabel di titik rawan untuk memperluas

jangkauan pengawasan, serta memanfaatkan media sosial untuk melaporkan pengendara yang sering melanggar aturan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban kerja personel tetapi juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas. Dengan dukungan teknologi yang tepat dan kemitraan yang kuat, keterbatasan personel dan sarana prasarana dapat diatasi secara efektif.

3. Pendekatan Kepada Masyarakat Lokal

Untuk mengatasi hambatan terkait infrastruktur jalan yang kurang memadai di wilayah Sipirok, diperlukan pendekatan yang kompleks, terstruktur, dan berkelanjutan. Solusi ini harus melibatkan perbaikan infrastruktur fisik, edukasi keselamatan, penguatan pengawasan, serta koordinasi lintas sektor. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan adanya peningkatan infrastruktur jalan di titik-titik yang dianggap paling rawan dan strategis. Polsek Sipirok perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan jalan rusak, khususnya pada ruas yang

sering dilalui pengendara sepeda motor. Perbaikan ini meliputi pengaspalan jalan yang berlubang, perataan permukaan yang bergelombang, serta pemasangan penerangan di kawasan gelap yang berisiko tinggi kecelakaan. Selain itu, penting untuk memasang rambu peringatan dan marka jalan di lokasi rawan agar pengendara lebih waspada dan memahami potensi bahaya.

Dari sisi pengawasan, Polsek Sipirok perlu mengadaptasi metode yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sosial setempat. Mengingat sulitnya akses ke beberapa wilayah, pembentukan jaringan pengawas dari masyarakat

setempat dapat menjadi solusi efektif. Para relawan ini dapat dilatih secara sederhana mengenai pemantauan dan pelaporan kondisi jalan serta pelanggaran yang terjadi. Selain itu, penggunaan teknologi sederhana seperti grup WhatsApp atau radio komunikasi dapat mempercepat distribusi informasi dan koordinasi antara pengawas lokal dengan pihak kepolisian. Pada titik-titik strategis seperti pasar, terminal, dan persimpangan utama, Polsek dapat mendirikan pos patroli sementara yang lebih fleksibel dalam memantau kepatuhan penggunaan helm.

4. Pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap kondisi local

Untuk mengatasi hambatan ekonomi dan sosial dalam penegakan hukum terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm di wilayah Polsek Sipirok, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap kondisi lokal. Dari sisi ekonomi, langkah pertama adalah memastikan ketersediaan helm berkualitas dengan harga terjangkau. Polsek bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta untuk menyubsidi harga helm berstandar nasional (SNI) atau menyediakan program cicilan ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, kampanye "Helm untuk Semua" bisa diperkenalkan, di mana komunitas lokal atau pengusaha setempat didorong untuk berpartisipasi dalam menyediakan helm gratis atau murah sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap perlengkapan keselamatan, tetapi juga membangun solidaritas komunitas dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Dari sisi sosial, diperlukan perubahan budaya yang lebih mendasar. Polsek Sipirok perlu memperkuat norma sosial yang mendukung penggunaan helm melalui kampanye yang mengedepankan aspek identitas positif. Misalnya, memperkenalkan helm sebagai simbol pengendara yang bertanggung jawab dan peduli pada keselamatan diri dan keluarga. Ini bisa diperkuat melalui cerita inspiratif dari tokoh lokal atau figur yang dihormati, sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan mengidentifikasi diri dengan perilaku yang aman. Selain itu, pendekatan yang melibatkan generasi muda, seperti lomba desain helm atau kampanye keselamatan di sekolah, bisa membantu membentuk pola pikir yang lebih positif terhadap penggunaan helm sejak dini.

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, skripsi ini mengacu pada Teori Kesadaran Hukum sebagai dasar konseptual dalam merumuskan strategi optimalisasi. Kesadaran hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan tokoh lain seperti A.W. Widjaya, bukan sekadar kepatuhan karena takut sanksi, melainkan kepatuhan yang bersumber dari pemahaman dan penghargaan terhadap hukum itu sendiri. Teori ini menekankan pentingnya membangun pemahaman hukum di masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan internalisasi nilai-nilai hukum. Dalam konteks ini, upaya optimalisasi yang direkomendasikan mencakup program safety riding, kampanye penggunaan helm di sekolah dan ruang publik, serta pendekatan kultural yang melibatkan tokoh masyarakat dan adat. Pendekatan represif tidak cukup apabila tidak disertai dengan peningkatan kesadaran hukum sebagai prasyarat utama terbentuknya budaya hukum. Dengan kata lain, teori kesadaran hukum

menjelaskan bahwa kepatuhan hukum yang sejati hanya akan terwujud bila masyarakat menganggap aturan sebagai bagian dari nilai kehidupan yang harus dijunjung, bukan semata karena adanya aparat atau ancaman sanksi. Oleh karena itu, optimalisasi penegakan hukum yang berkelanjutan harus diarahkan pada transformasi budaya hukum masyarakat dari kepatuhan terpaksa menjadi kepatuhan sadar.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm di wilayah Kepolisian Sektor Sipirok telah dilakukan melalui Sosialisasi dan Edukasi Keselamatan Berkendara, Kampanye kesadaran di media lokal dan sosial, teguran lisan, hukuman fisik (push-up), dan penilangan. Meskipun aparat telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan, implementasinya belum efektif dalam mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan karena masih bersifat reaktif dan belum dibarengi pendekatan edukatif yang kuat. Penegakan yang dominan represif ini cenderung hanya memberikan efek jera sesaat.
2. Adapun hambatan utama dalam proses penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sosialisasi peraturan, terbatasnya jumlah petugas dan sarana pendukung, serta plemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan berlalu lintas. Masyarakat umumnya memakai helm bukan karena kesadaran akan keselamatan, melainkan sekadar menghindari sanksi.
3. Upaya optimalisasi yang diperlukan mencakup peningkatan edukasi publik, keterlibatan tokoh masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih konsisten dan didukung sarana yang memadai. Pendekatan ini bertujuan mendorong perubahan perilaku dan membentuk budaya hukum yang lebih taat dan sadar keselamatan.

Saran

1. Untuk Kepolisian Sektor Sipirok, diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya penggunaan helm secara berkelanjutan, baik di sekolah, tempat umum, maupun komunitas. Razia lalu lintas perlu dilakukan secara rutin di seluruh wilayah, termasuk desa-desa, dengan pendekatan yang humanis. Selain itu, kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi pemuda perlu diperkuat, misalnya melalui pembentukan relawan keselamatan lalu lintas sebagai mitra lapangan.
2. Untuk Pemerintah Daerah, disarankan memberikan dukungan nyata berupa penyediaan sarana pendukung seperti kendaraan patroli dan pos pemantauan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan subsidi helm SNI bagi masyarakat kurang mampu serta mengintegrasikan edukasi keselamatan lalu lintas dalam program pembangunan dan pembinaan masyarakat untuk menumbuhkan budaya hukum.
3. Untuk Masyarakat Kecamatan Sipirok, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan menjadikan helm sebagai kebutuhan keselamatan, bukan sekadar kewajiban hukum. Ketaatan terhadap aturan lalu lintas hendaknya tumbuh dari pemahaman, bukan rasa takut. Partisipasi aktif dalam mendukung program keselamatan dan menjadi teladan tertib berlalu lintas sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence), Kencana, 2009.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM PRESS, Pamulang, 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Chazawi, Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Garaika dan Darmanah, Metodologi Penelitian, CV. Hira Tech, Lampung Selatan, 2019.
- Harun M. Husen, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Hasaziduhu Moho, Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan

- kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi. KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 71. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020. Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta.
- Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya.
- Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2008. Petunjuk Teknis Tentang Fungsi Lalu Lintas, Departemen Pertahanan Keamanan Mabes Polri, Tahun 2000.
- Rahardjo, Agus, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003).
- Siddiq, Anggit M, et.al., Kajian Pustaka Dalam Artikel Jurnal, Bandung, 2020. Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.
- Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 57 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Widjaya, A.W Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila (Jakarta, CV. Era Swasta:1984), Cet. zainuddin ali, metode penelitian hukum, sinar grafika, jakarta, 2018.
- B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI**
- Djaenab, efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, jurnal pendidikan dan studi islam.
- Hari sanjaya putra, "penegakkan hukum kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor di wilayah hukum polres kabupaten kepulauan meranti berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan", skripsi, program sarjana hukum universitas lancang kuning, pekanbaru, 2020.
- I.H. Sulistyawan, B.H. Harahap, magmatisme, sumberdaya mineral dan energi di tapanuli selatansumatera utara, JSD.Geol. Vol. 23 No. 3 Agustus 2013.
- Lalu M. Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022.
- Lendrie Adi P. Rembet, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas", Jurnal JURRISH 2, no. 2 (Juli 2023).
- Ni made yuli ratna dewi, i nyoman putu budiarta, i ketut sukadana, "penegakan hukum terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat berpakaian adat bali di wilayah hukum polres tabanan", jurnal prefensi hukum, vol 1, no. 1 juli 2020.
- Oktir Nebi, Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi, Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Volume. 1 No. 3 September 2024.
- Prawiyogi, Anggy Giri dan, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, Popy Nur Elisa, Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar, Jurnal Basicedu Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021.
- Resmi Arianti, Mardani Sebayang, Edi Yusuf Adiman, karakteristik pengendara sepeda motor dan penggunaan helm di kota pekanbaru provinsi Riau, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, Volume 4, No. 2, Februari 2023
- Rinaldi Putra Anwar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2022).
- Samuel Yohenson Yoce Matthews dan I Nengah suharta, Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 8 No. 5 Tahun 2020, hlm. 709-721.
- Sulanjar Tri Setiawan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity".
Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan", Pampas: Journal of Criminal, Vol.1, No.3, 2020, hlm. 79-91.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. WESBITE

<https://lektur.id/arti-kendaraan-bermotor/>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025 pukul 15.32

<https://tapselkab.go.id/page/sejarah-kab-tapanuli-selatan>, diakses pada tanggal 12 Mei 2025 Pukul 15.19 WIB.

<https://tapanuliselatankab.bps.go.id> <https://tapselkab.go.id/page/sejarah-kab-tapanuli-selatan>